

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran serta dukungan penuh dari masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan. Perkembangan dunia pendidikan yang terus berkembang memerlukan adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dari orang tua murid dalam mensukseskan proses belajar mengajar. Bentuk dukungannya pun tidak hanya dalam bentuk keuangan, orang tua murid melalui komite sekolah juga diharapkan dapat merundingkan serta mengembangkan program-program yang dapat mendukung kinerja pemberdayaan secara optimal.

Adanya faktor kemauan dan faktor kemampuan berpartisipasi berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan adanya faktor kesempatan berasal dari luar. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar menyekolahkan anak-anak mereka, namun ikut serta dalam upaya pengawasan maupun pengontrol program-program sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga harus memberikan jembatan dan peluang agar masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam memajukan dunia pendidikan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan sistem pendidikan di segala aspek terutama terkait penerapan manajemen atau pengelolaan sekolah tersebut dengan lebih tepat dan efektif. Seperti halnya persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? dari berbagai pengamatan dan analisis, ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita mengalami peningkatan secara merata. Seperti kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana perbaikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi.

Kemudian penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratis sentralistik, sehingga meningkat sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan yang tergantung pada keputusan birokrasi-birokrasi. Dan kemudian

faktor yang cukup penting adalah minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orang tua selama ini dengan sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat atau orang tua sebagai *stake holder* yang berkepentingan dengan pendidikan.

Disinilah terlihat bahwa peran aktif dan keterlibatan masyarakat pendidikan diperlukan, dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah. maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya (Hasbullah, 2007; hal.4). Dalam masalah ini, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah dan berupaya menawarkan partisipasi langsung kepada berbagai pihak terkait atau *stakeholders*. Sehingga terbentuklah peran pemerintah yang sangat dominan dan peran masyarakat menjadi suatu kewajiban.

Pola bidang pendidikan diatas oleh UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan pasal 51 menyatakan pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip manajemen

berbasis sekolah. Dalam Manajemen berbasis sekolah dimana memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan semua unsur stakeholder untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. Sementara pada pasal 9, UU No. 20 tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa: Masyarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Realita selama ini partisipasi masyarakat (*stakeholders*) lebih berupa dukungan pendanaan semata, masyarakat cenderung kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan kepada masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Menawan Grobogan dalam penerapan atau implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masyarakat disekitar lingkungan sekolah dan masyarakat luas pada umumnya belum terlibat dan dilibatkan secara lebih aktif, padahal agar terjadi sinergi yang harmonis dalam dunia pendidikan masyarakat dan juga orang tua siswa harus dilibatkan, sehingga perlu adanya pemberdayaan agar keterlibatan mereka tidak sekedar terlibat saja tapi efektif dan optimal sesuai tujuan pendidikan dalam rangka penerapan manajemen berbasis sekolah.

Berangkat dari realita tersebut sejatinya sekolah membutuhkan banyak masukan-masukan dari masyarakat dalam rangka merumuskan berbagai program yang relevan dan bantuan masyarakat dalam pengimplementasiannya. Kemudian juga dari sisi lain adanya hubungan timbal balik, disaat masyarakat

juga memerlukan sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan yang dikehendaki masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana persiapan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan?
3. Bagaimana evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persiapan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan.

3. Mendeskripsikan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Menawan Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literature Yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kepemimpinannya dalam mengelola sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- b. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama antara guru dan komite sekolah dalam mewujudkan kualitas pendidikan di sekolah.
- c. Bagi orang tua siswa penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan peran sertanya dalam meningkatkan mutu sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah